

Transformasi Digital dalam Manajemen Pendidikan Islam di Era Society 5.0

Halimatus Sa'diyah

Universitas Islam An Nur Lampung

* Halimah@an-nur.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 10 Oktober 2026

Revised 15 Oktober 2026

Accepted 20 Oktober 2026

Available online 28 Oktober 2026

Kata Kunci:

transformasi digital, manajemen pendidikan Islam, Society 5.0, tata kelola digital, nilai-nilai Islam.

Keywords:

digital transformation, Islamic education management, Society 5.0, digital governance, Islamic values

This is an open access article under the CC BY-SA

Artikel ini menempatkan amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan sebagai landasan etis dalam pengelolaan pendidikan digital. Kerangka konseptual yang dirumuskan diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengembangan kebijakan transformasi digital yang berkelanjutan pada lembaga pendidikan Islam.

ABSTRAK

Transformasi digital menjadi salah satu tantangan strategis dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam di era Society 5.0. Perkembangan teknologi informasi menuntut lembaga pendidikan Islam untuk menata kembali sistem manajemen agar lebih efektif, adaptif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan manusia tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman. Artikel ini bertujuan menganalisis transformasi digital dalam manajemen pendidikan Islam, mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasinya, serta merumuskan kerangka pengelolaan digital yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui penelaahan buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kritis melalui pengelompokan tema, perbandingan gagasan, dan sintesis konseptual. Pembahasan difokuskan pada integrasi teknologi dalam fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi pendidikan. Analisis konseptual mengarahkan perhatian pada lima aspek utama, yaitu kesiapan infrastruktur digital, kompetensi sumber daya manusia, kepemimpinan adaptif, tata kelola data yang akuntabel, dan internalisasi nilai-nilai Islam. Kelima aspek tersebut perlu dikembangkan secara terpadu agar pemanfaatan teknologi tidak berhenti pada digitalisasi administrasi, tetapi berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan, efektivitas pengambilan keputusan, dan pemerataan akses pendidikan.

ABSTRACT

Digital transformation has become one of the strategic challenges in the management of Islamic educational institutions in the Society 5.0 era. The advancement of information technology requires Islamic educational institutions to restructure their management systems to become more effective, adaptive, transparent, and responsive to human needs without neglecting Islamic values. This article aims to analyze digital transformation in Islamic education management, identify the opportunities and challenges of its implementation, and formulate a digital management framework grounded in Islamic principles. This study employs a qualitative approach using the library research method. Data were obtained through a review of academic books, scientific journal articles, and relevant policy documents, which were subsequently analyzed descriptively and critically through thematic categorization, comparison of ideas, and conceptual synthesis. The discussion focuses on the integration of technology into the functions of planning, organizing, implementing, monitoring, and evaluating education. The conceptual analysis highlights five key aspects: digital infrastructure readiness, human resource competencies, adaptive leadership, accountable data governance, and the internalization of Islamic values. These five aspects need to be developed in an integrated manner to ensure that technology adoption goes beyond administrative digitalization and contributes to improving service quality, decision-making effectiveness, and equitable access to education. This article positions trustworthiness (*amanah*), justice, responsibility, and public benefit (*maslahah*) as ethical foundations for digital education management. The proposed conceptual framework is expected to serve as a foundation for developing sustainable digital transformation policies in Islamic educational institutions.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap cara organisasi merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai aktivitas kelembagaan, termasuk

dalam bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi, sistem informasi manajemen, komputasi awan, analisis data, dan kecerdasan buatan telah membuka peluang bagi lembaga pendidikan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pelayanan, serta memperkuat pengambilan keputusan. Namun, perubahan tersebut tidak cukup dipahami sebagai penggunaan perangkat teknologi dalam kegiatan operasional. Transformasi digital merupakan proses perubahan organisasi yang melibatkan strategi, struktur, budaya kerja, sumber daya manusia, dan pola penciptaan nilai.¹ Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital dalam pendidikan sangat bergantung pada kemampuan lembaga mengintegrasikan teknologi dengan kebutuhan organisasi dan tujuan pendidikan.

Perubahan tersebut semakin relevan dalam konteks Society 5.0, yaitu konsep masyarakat yang menempatkan manusia sebagai pusat perkembangan teknologi melalui integrasi ruang siber dan ruang fisik. Konsep ini menekankan bahwa kemajuan teknologi perlu berjalan seiring dengan upaya menyelesaikan persoalan sosial dan meningkatkan kesejahteraan manusia.² Dalam bidang pendidikan, orientasi tersebut menuntut pemanfaatan teknologi yang tidak hanya berfokus pada kecepatan dan efisiensi, tetapi juga memperhatikan kualitas pembelajaran, pemerataan akses, keamanan informasi, serta kebutuhan peserta didik. UNESCO melalui *Global Education Monitoring Report 2023* menegaskan pentingnya menilai penggunaan teknologi pendidikan berdasarkan relevansi, pemerataan, kualitas, skalabilitas, dan keberlanjutan. Laporan tersebut juga mengingatkan bahwa manfaat teknologi tidak selalu muncul secara otomatis dan bahwa interaksi manusia tetap menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan.³ Dengan demikian, transformasi digital perlu diposisikan sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar simbol modernisasi kelembagaan.

Dalam konteks Manajemen Pendidikan Islam (MPI), transformasi digital memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan dengan pengelolaan lembaga sekaligus pemeliharaan orientasi spiritual, moral, dan pembentukan akhlak. Madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam menghadapi kebutuhan untuk memperbarui sistem administrasi, pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan akademik, pengawasan program, dan pengambilan keputusan tanpa kehilangan identitas keislamannya. Pemanfaatan teknologi perlu diarahkan untuk mendukung keteraturan organisasi, meningkatkan akuntabilitas, dan memperluas manfaat pendidikan bagi masyarakat. Pada saat yang sama, lembaga harus memperhatikan persoalan kesenjangan infrastruktur, perbedaan kompetensi digital, perlindungan data pribadi, serta kemungkinan berkurangnya kualitas interaksi langsung apabila teknologi diterapkan tanpa pertimbangan pedagogis dan etis. Oleh sebab itu, transformasi digital dalam pendidikan Islam membutuhkan pendekatan manajerial yang menyatukan inovasi teknologi, kesiapan organisasi, dan tanggung jawab moral.

Secara konseptual, manajemen pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kehadiran teknologi digital dapat memperkuat setiap fungsi tersebut apabila diterapkan berdasarkan kebutuhan dan tujuan kelembagaan. Dalam perencanaan, data dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan sumber daya dan menetapkan prioritas program. Dalam pengorganisasian, sistem digital dapat membantu memperjelas pembagian tugas dan koordinasi antarbagiannya. Dalam pelaksanaan, teknologi dapat mendukung administrasi, komunikasi, dan pelayanan pendidikan. Sementara itu, dalam pengawasan dan evaluasi, informasi digital dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan program serta mengidentifikasi aspek yang memerlukan perbaikan. Meskipun demikian, penggunaan sistem digital tetap membutuhkan validasi data, kompetensi pengelola, mekanisme pertanggungjawaban, dan pengawasan manusia agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga tepat secara substantif.

Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara transformasi digital dan pengelolaan pendidikan Islam. Hambali dan Azahra, misalnya, mengkaji transformasi digital sistem informasi manajemen Pendidikan Agama Islam dalam konteks Society 5.0, dengan perhatian pada efektivitas administrasi, transparansi data, serta tantangan penerapan teknologi.⁴

¹ Gregory Vial, "Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda," *The Journal of Strategic Information Systems* 28, no. 2 (2019): 118–144, <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>.

² Cabinet Office, Government of Japan, "Society 5.0," diakses 28 Oktober 2026, https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html.

³ Global Education Monitoring Report Team, *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education—A Tool on Whose Terms?* (Paris: UNESCO, 2023), <https://www.unesco.org/gem-report/en/publication/technology>.

⁴ M. Syahbai Hambali dan Khalida Zia Fitrah Azahra, "Transformasi Digital Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Agama Islam pada Era Society 5.0," *An-nida: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.30999/an-nida.v14i1.4160>.

Shobri dan Jaosantia membahas transformasi digital dalam manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam dengan menyoroti strategi, tantangan, peluang, kepemimpinan digital, dan nilai spiritual.⁵ Sementara itu, Rizal dan kolega mengembangkan kajian mengenai pendidikan tinggi Islam yang berorientasi pada *insan kamil* melalui integrasi teknologi digital, kurikulum, dan kepemimpinan berbasis nilai.⁶ Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital dalam pendidikan Islam merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penyediaan infrastruktur atau penggunaan aplikasi. Berdasarkan penelaahan awal terhadap sejumlah publikasi yang relevan, ruang pengembangan yang dipilih terletak pada penyusunan hubungan konseptual antara fungsi manajemen, kesiapan sumber daya manusia, tata kelola digital yang akuntabel, dan orientasi nilai Islam dalam satu kerangka analisis. Fokus tersebut diarahkan untuk menjelaskan bagaimana teknologi dapat diintegrasikan ke dalam keseluruhan proses manajemen pendidikan, bagaimana risiko dan keterbatasan penerapannya perlu dikelola, serta bagaimana prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan dapat diterjemahkan ke dalam praktik tata kelola. Dengan demikian, pembahasan tidak berhenti pada inventarisasi peluang dan tantangan digitalisasi, tetapi diarahkan pada perumusan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk memahami transformasi digital sebagai perubahan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan kemanusiaan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis transformasi digital dalam manajemen pendidikan Islam di era Society 5.0, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya, serta merumuskan kerangka konseptual yang mengintegrasikan teknologi, fungsi manajemen, kapasitas sumber daya manusia, tata kelola yang akuntabel, dan nilai-nilai Islam. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus Manajemen Pendidikan Islam sekaligus memberikan pertimbangan konseptual bagi pimpinan madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam dalam merancang kebijakan transformasi digital yang adaptif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Transformasi digital merupakan proses perubahan organisasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperbarui strategi, proses kerja, struktur organisasi, dan cara organisasi menciptakan nilai. Vial menjelaskan bahwa transformasi digital berkaitan dengan proses perubahan yang dipicu oleh penggunaan teknologi digital dan berdampak pada cara organisasi menghadapi perubahan lingkungan serta mengembangkan respons strategis.⁷ Perspektif ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak cukup dipahami sebagai pengadaan perangkat teknologi atau penggunaan aplikasi dalam aktivitas administratif, melainkan sebagai perubahan yang menyentuh keseluruhan sistem organisasi.

Verhoef dan kolega memandang transformasi digital sebagai fenomena multidimensional yang berkaitan dengan perubahan teknologi, model organisasi, strategi, serta hubungan organisasi dengan pihak-pihak yang dilayaninya.⁸ Dalam konteks pendidikan, pemikiran tersebut memberikan dasar untuk memahami bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sistem informasi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga mengintegrasikan teknologi dengan tujuan pendidikan, kompetensi sumber daya manusia, dan kebutuhan pengguna layanan.

Berdasarkan perspektif tersebut, transformasi digital dalam manajemen pendidikan Islam dapat dimaknai sebagai proses pembaruan sistem pengelolaan lembaga pendidikan melalui integrasi teknologi digital ke dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Proses ini mencakup pembaruan sistem administrasi, pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan akademik, komunikasi kelembagaan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Transformasi digital juga perlu dibedakan dari digitalisasi administratif. Digitalisasi administratif berfokus pada perubahan media atau prosedur kerja, misalnya pengalihan arsip cetak menjadi arsip elektronik. Sebaliknya, transformasi digital menuntut evaluasi terhadap proses kerja dan

⁵ Muwafiqus Shobri dan Jasmani Jaosantia, "Digital Transformation in Islamic Education Management and Leadership: Strategies, Challenges, and Education 1, no. 1 (2026): 1–13, <https://www.ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/jisedu/article/view/769>.

⁶ Muhammad Rizal, Muhammad Hidayat Ginanjar, Abdul Kodir Nurhasan, dan Muhamad Rifan Dainuri, "Insan Kamil-Oriented Islamic Higher Education in Society 5.0: A Systematic Literature Review of Digital Transformation, Curriculum Integration, and Value-Based Islamic Leadership," *Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2025): 357–375, <https://doi.org/10.14421/jpi.2025.142.357-375>.

⁷ Gregory Vial, "Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda," *The Journal of Strategic Information Systems* 28, no. 2 (2019): 118–144, <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>.

⁸ Peter C. Verhoef et al., "Digital Transformation: A Multidisciplinary Reflection and Research Agenda," *Journal of Business Research* 122 (2021): 889–901, <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>.

pola pengambilan keputusan agar penggunaan teknologi memberikan manfaat yang lebih luas bagi organisasi. Pembedaan ini penting karena lembaga pendidikan dapat saja menggunakan banyak aplikasi tanpa mengalami perubahan berarti dalam kualitas tata kelolanya.

Dalam penelitian ini, konsep transformasi digital digunakan untuk menganalisis perubahan pada tiga dimensi utama. Pertama, dimensi teknologi yang mencakup infrastruktur, sistem informasi, dan keamanan data. Kedua, dimensi organisasi yang mencakup kepemimpinan, budaya kerja, kompetensi sumber daya manusia, serta integrasi fungsi manajemen. Ketiga, dimensi nilai yang berkaitan dengan orientasi pelayanan, tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan. Ketiga dimensi tersebut menjadi dasar untuk memahami transformasi digital sebagai proses perubahan kelembagaan yang menyeluruh.

Society 5.0 merupakan konsep masyarakat yang dikembangkan di Jepang dengan menempatkan manusia sebagai pusat inovasi melalui integrasi ruang siber dan ruang fisik. Konsep ini mengarahkan perkembangan teknologi untuk membantu menyelesaikan persoalan sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁹ Dengan demikian, teknologi tidak diposisikan semata-mata sebagai instrumen efisiensi, tetapi sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Dalam bidang pendidikan, orientasi Society 5.0 mendorong pemanfaatan teknologi yang mampu mendukung kebutuhan belajar, memperluas akses terhadap pengetahuan, dan meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga. Sistem informasi dapat membantu mempercepat pelayanan akademik, sedangkan analisis data dapat digunakan untuk mengenali kebutuhan pembelajaran dan mengevaluasi program pendidikan. Meskipun demikian, penggunaan teknologi perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi peserta didik, kesiapan pendidik, dan ketersediaan infrastruktur agar inovasi tidak justru memperlebar kesenjangan.

UNESCO menekankan bahwa pemanfaatan teknologi pendidikan perlu dinilai berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan, pemerataan akses, kualitas, dan keberlanjutan.¹⁰ Perspektif tersebut menegaskan bahwa keputusan menggunakan teknologi harus didasarkan pada kebutuhan pendidikan, bukan semata-mata mengikuti perkembangan tren. Teknologi yang canggih belum tentu menjadi pilihan terbaik apabila tidak sesuai dengan kemampuan organisasi atau tidak memberikan manfaat nyata bagi peserta didik.

Bagi lembaga pendidikan Islam, orientasi berpusat pada manusia memiliki relevansi dengan tujuan pendidikan yang mencakup pengembangan pengetahuan, pembentukan akhlak, dan penguatan tanggung jawab sosial. Pemanfaatan teknologi karena itu perlu mempertahankan peran pendidik dalam membimbing, memberikan keteladanan, dan membangun interaksi edukatif. Sistem digital dapat membantu pengelolaan pembelajaran, tetapi tidak sepenuhnya menggantikan dimensi relasional dan moral dalam pendidikan.

Dalam kajian ini, Society 5.0 digunakan sebagai perspektif untuk menilai apakah transformasi digital pendidikan Islam telah berorientasi pada kebutuhan manusia. Orientasi tersebut mencakup aksesibilitas layanan, kualitas interaksi pendidikan, perlindungan data pribadi, pengembangan kompetensi, dan pemerataan manfaat teknologi. Dengan pendekatan ini, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur melalui tingkat penggunaan teknologi, tetapi juga melalui kontribusinya terhadap tujuan pendidikan.

Manajemen pendidikan merupakan proses pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan fungsi organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan bertanggung jawab. Dalam kajian kepemimpinan dan manajemen pendidikan, pengelolaan lembaga berkaitan dengan penetapan arah, pengorganisasian sumber daya, pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan.¹¹ Fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan dan membentuk siklus pengelolaan yang memungkinkan lembaga melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Manajemen pendidikan Islam memiliki cakupan yang sejalan dengan prinsip umum manajemen pendidikan, tetapi pelaksanaannya diarahkan pada tujuan dan nilai-nilai Islam. Nilai tersebut mencakup amanah, keadilan, tanggung jawab, musyawarah, dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, efektivitas

⁹ Cabinet Office, Government of Japan, "Society 5.0," https://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.html

¹⁰ Global Education Monitoring Report Team, *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in Education—A Tool on Whose Terms?* (Paris: UNESCO, 2023), <https://www.unesco.org/gem-report/en/publication/technology>

¹¹ Tony Bush, *Theories of Educational Leadership and Management*, edisi ke-5 (London: SAGE Publications, 2020).

manajemen tidak hanya dinilai dari ketercapaian target administratif, tetapi juga dari proses pengambilan keputusan, kualitas pelayanan, penggunaan sumber daya, dan pertanggungjawaban moral.

Dalam konteks transformasi digital, fungsi manajemen pendidikan Islam dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan proses menentukan tujuan, kebutuhan, prioritas, strategi, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan program. Teknologi digital dapat membantu menyediakan data untuk memetakan kebutuhan lembaga, menyusun program kerja, dan menentukan indikator keberhasilan. Namun, perencanaan berbasis data harus mempertimbangkan validitas informasi serta kebutuhan nyata warga lembaga.

Kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian mencakup pembagian tugas, penetapan tanggung jawab, pengaturan sumber daya, dan pembentukan koordinasi antarbagiannya. Dalam pengelolaan digital, lembaga perlu menetapkan tanggung jawab terhadap sistem informasi, pemeliharaan teknologi, perlindungan data, serta pendampingan pengguna. Kejelasan tanggung jawab dibutuhkan agar transformasi digital tidak hanya bergantung pada individu tertentu.

Ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan penerapan program dan kebijakan sesuai rencana. Teknologi digital dapat mendukung komunikasi organisasi, administrasi akademik, penyebaran informasi, pengelolaan dokumen, dan layanan pembelajaran. Keberhasilannya bergantung pada kesiapan pengguna, prosedur operasional, dan dukungan kepemimpinan.

Keempat, pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sistem informasi dapat memudahkan pemantauan program, penyusunan laporan, dan pemeriksaan capaian indikator. Evaluasi diperlukan untuk menilai apakah penggunaan teknologi benar-benar meningkatkan kualitas layanan dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Keempat fungsi tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital tidak dapat dipisahkan dari tata kelola organisasi. Penggunaan teknologi perlu disertai penyesuaian proses kerja, pengembangan kompetensi, serta penetapan indikator evaluasi. Tanpa integrasi tersebut, digitalisasi berisiko hanya menghasilkan perubahan pada alat kerja tanpa memperbaiki efektivitas manajemen.

Dengan demikian, manajemen pendidikan Islam dalam era Society 5.0 perlu dipahami sebagai proses pengelolaan yang mengintegrasikan kemampuan teknologi, kapasitas organisasi, dan orientasi nilai. Perspektif ini menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana lembaga pendidikan Islam dapat mengembangkan tata kelola digital yang adaptif tanpa mengabaikan tujuan pendidikan dan tanggung jawab moral.

Transformasi digital dalam pendidikan Islam memerlukan landasan etika agar penggunaan teknologi tetap sejalan dengan tujuan pendidikan dan tanggung jawab kelembagaan. Teknologi dapat mempercepat proses kerja dan memperluas akses informasi, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan apabila digunakan tanpa pertimbangan mengenai keadilan, kerahasiaan, akurasi, dan dampaknya terhadap manusia. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam perlu diterjemahkan ke dalam prinsip tata kelola yang dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Amanah merupakan prinsip penting dalam pengelolaan organisasi. Al-Qur'an memerintahkan agar amanah disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya dan agar keputusan ditetapkan secara adil.¹² Dalam tata kelola digital, prinsip amanah dapat diterapkan melalui pengelolaan data yang akurat, pembatasan akses sesuai kewenangan, penggunaan sistem berdasarkan tujuan yang jelas, dan pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil.

Keadilan menuntut agar pemanfaatan teknologi tidak menciptakan perlakuan yang merugikan kelompok tertentu. Dalam pendidikan, prinsip ini mencakup perhatian terhadap peserta didik, pendidik, dan keluarga yang memiliki keterbatasan perangkat, jaringan internet, atau keterampilan digital. Lembaga perlu mempertimbangkan alternatif layanan agar transformasi digital tidak menjadi penghalang bagi pihak yang membutuhkan akses pendidikan.

Tanggung jawab berkaitan dengan kesediaan pengelola mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan dampak kebijakan. Dalam sistem digital, tanggung jawab mencakup pemeriksaan kualitas informasi, pengamanan data, evaluasi sistem, serta keterlibatan manusia dalam keputusan

¹² Al-Qur'an, Surah An-Nisa [4]: 58.

penting. Penggunaan teknologi otomatis tidak menghilangkan kewajiban pimpinan dan tenaga profesional untuk memeriksa ketepatan serta kelayakan keputusan.

Ihsan dapat dipahami sebagai dorongan untuk melaksanakan pekerjaan secara baik dan terus memperbaiki kualitasnya. Dalam manajemen pendidikan Islam, prinsip ini dapat diterapkan melalui evaluasi pelayanan, pengembangan kompetensi digital, perbaikan prosedur kerja, dan pengembangan inovasi yang benar-benar memberikan manfaat kepada warga lembaga.

Kemaslahatan menjadi pertimbangan untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi menghasilkan manfaat yang sepadan dengan biaya, risiko, dan konsekuensinya. Lembaga pendidikan Islam perlu memilih sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi, bukan semata-mata karena teknologi tersebut sedang populer. Keputusan juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan pemeliharaan, perlindungan privasi, dan dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan.

Prinsip-prinsip tersebut tidak cukup dicantumkan dalam visi atau dokumen kelembagaan. Nilai amanah, keadilan, tanggung jawab, ihsan, dan kemaslahatan perlu diwujudkan melalui standar operasional, pembagian kewenangan, kebijakan keamanan informasi, mekanisme pengaduan, dan evaluasi berkala. Dengan demikian, nilai-nilai Islam dapat berfungsi sebagai dasar etis dalam mengarahkan perubahan digital sekaligus menjadi pembeda orientasi manajemen pendidikan Islam.

Berdasarkan uraian teoretis tersebut, transformasi digital dalam manajemen pendidikan Islam dapat dipahami melalui hubungan antara kesiapan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, kepemimpinan, tata kelola, dan orientasi nilai. Kerangka ini dikembangkan sebagai sintesis konseptual untuk menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak ditentukan oleh satu faktor secara terpisah, melainkan oleh keterpaduan berbagai unsur dalam organisasi.

Kesiapan teknologi menyediakan sarana yang memungkinkan proses kerja dilaksanakan secara digital. Kapasitas sumber daya manusia menentukan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan, mengelola, dan mengevaluasi sistem. Kepemimpinan berperan dalam menentukan arah perubahan, membangun koordinasi, dan memastikan bahwa program digital sesuai dengan tujuan kelembagaan. Tata kelola digital menyediakan aturan mengenai kualitas data, keamanan informasi, aksesibilitas, dan pertanggungjawaban. Sementara itu, nilai-nilai Islam memberikan orientasi etis agar seluruh proses tersebut tetap berpusat pada manusia dan kemaslahatan pendidikan.

Dalam kerangka ini, hasil transformasi digital dapat dinilai melalui beberapa dimensi, yaitu efektivitas administrasi, kualitas pelayanan, ketepatan pengambilan keputusan, pemerataan akses, akuntabilitas pengelolaan, serta kesesuaian praktik digital dengan nilai-nilai Islam. Dimensi-dimensi tersebut merupakan indikator konseptual yang perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lembaga dan dapat diuji melalui penelitian empiris.

Kerangka konseptual ini menempatkan transformasi digital sebagai proses perubahan kelembagaan yang berkelanjutan. Teknologi tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk memperkuat fungsi manajemen dan meningkatkan mutu pendidikan. Pada saat yang sama, nilai-nilai Islam berperan sebagai landasan etis yang mengarahkan penggunaan teknologi agar tetap bertanggung jawab, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai transformasi digital dalam manajemen pendidikan Islam di era Society 5.0. Penelitian diarahkan untuk menganalisis pemikiran teoretis, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan digitalisasi pendidikan, fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam, integrasi nilai-nilai Islam, dan tantangan pengelolaan lembaga pendidikan dalam perkembangan teknologi digital.

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen kebijakan dan publikasi resmi yang relevan dengan transformasi digital, pendidikan, serta pengembangan masyarakat berbasis teknologi. Sementara itu, sumber sekunder meliputi buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas manajemen pendidikan Islam dan penerapan teknologi digital dalam tata kelola pendidikan. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas penerbit, kejelasan identitas bibliografis, serta kontribusinya terhadap analisis permasalahan yang dikaji.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada basis data ilmiah, seperti Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal akademik yang relevan. Literatur yang diperoleh diseleksi

berdasarkan kesesuaian topik, keterlacakan sumber, dan substansi pembahasannya. Selanjutnya, informasi yang relevan dicatat dan dikelompokkan berdasarkan empat fokus kajian, yaitu konsep transformasi digital dalam manajemen pendidikan Islam, integrasi teknologi digital dalam fungsi manajemen, penerapan nilai-nilai Islam dalam tata kelola digital, serta peluang, tantangan, dan strategi transformasi digital di era Society 5.0.

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan sintesis konseptual. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, identifikasi gagasan utama dari literatur yang berkaitan dengan transformasi digital dan manajemen pendidikan Islam. Kedua, kategorisasi data berdasarkan tema-tema penelitian untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta hubungan antarkonsep. Ketiga, interpretasi dan sintesis temuan literatur untuk merumuskan pemahaman mengenai strategi transformasi digital yang relevan dengan karakteristik dan nilai-nilai dasar pendidikan Islam. Proses analisis ini mengacu pada prinsip kajian literatur sistematis sebagaimana dijelaskan oleh Snyder (2019), bahwa tinjauan literatur dapat digunakan sebagai metodologi penelitian untuk mengintegrasikan dan mengembangkan pemahaman konseptual dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Keabsahan analisis dijaga melalui perbandingan antarsumber, pemeriksaan konsistensi informasi, dan penggunaan referensi yang dapat diverifikasi. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, hasil penelitian disajikan dalam bentuk sintesis konseptual berdasarkan literatur yang dianalisis, bukan sebagai temuan empiris dari observasi atau wawancara lapangan. Dengan demikian, metode ini diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah bagi perumusan strategi transformasi digital dalam manajemen pendidikan Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transformasi Digital sebagai Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Islam di Era Society 5.0

Transformasi digital dalam manajemen pendidikan Islam merupakan proses perubahan tata kelola kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya, kualitas pelayanan, transparansi administrasi, dan mutu pendidikan. Perubahan tersebut tidak dapat dipahami sebatas penggunaan perangkat teknologi atau pemindahan dokumen konvensional ke dalam format digital. Transformasi digital menuntut penyesuaian sistem kerja, budaya organisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta pola pengambilan keputusan yang lebih adaptif terhadap perkembangan lingkungan pendidikan.

Era Society 5.0 menempatkan manusia sebagai pusat perkembangan teknologi. Dalam konteks pendidikan Islam, orientasi tersebut memiliki relevansi dengan pandangan pendidikan yang tidak hanya menekankan penguasaan pengetahuan, tetapi juga pembentukan akhlak, tanggung jawab sosial, dan kematangan spiritual. Oleh karena itu, teknologi digital perlu ditempatkan sebagai sarana untuk mendukung tujuan pendidikan, bukan sebagai tujuan akhir penyelenggaraan pendidikan itu sendiri.

Hasil sintesis konseptual menunjukkan bahwa transformasi digital dalam manajemen pendidikan Islam dapat dipahami melalui tiga dimensi yang saling berhubungan. Pertama, dimensi teknologis yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur, sistem informasi manajemen, aplikasi administrasi, dan platform pembelajaran digital. Kedua, dimensi organisasional yang mencakup kepemimpinan, pembagian tugas, pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, serta perubahan budaya kerja. Ketiga, dimensi nilai yang berhubungan dengan integritas, amanah, keadilan, tanggung jawab, dan orientasi kemaslahatan dalam pengelolaan lembaga pendidikan.

Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur berdasarkan jumlah perangkat yang dimiliki atau banyaknya layanan yang telah menggunakan aplikasi. Keberhasilan juga perlu dilihat dari kemampuan teknologi dalam menyelesaikan persoalan kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat akuntabilitas, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan Islam. Dengan demikian, digitalisasi harus menjadi bagian dari strategi pengembangan lembaga yang direncanakan secara terarah dan berkelanjutan.

Kajian Shobri dan Jaosantia mengenai transformasi digital dalam manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam menekankan keterkaitan antara kompetensi kepemimpinan digital, budaya organisasi berbasis nilai Islam, kesiapan infrastruktur, dan dukungan kebijakan. Perspektif tersebut memperkuat pemahaman bahwa transformasi digital merupakan proses perubahan kelembagaan yang melibatkan aspek teknologi sekaligus manusia dan nilai-nilai organisasi.¹

Berdasarkan analisis tersebut, transformasi digital dalam pendidikan Islam dapat dirumuskan sebagai proses integrasi teknologi, tata kelola, dan nilai-nilai keislaman untuk membangun lembaga pendidikan yang efektif, adaptif, transparan, dan tetap berorientasi pada pembentukan manusia yang berilmu serta berakhlak. Rumusan ini menjadi landasan untuk memahami penerapan teknologi pada setiap fungsi manajemen pendidikan Islam.

B. Integrasi Teknologi Digital dalam Fungsi-Fungsi Manajemen Pendidikan Islam

Transformasi digital memiliki implikasi terhadap pelaksanaan fungsi manajemen pendidikan Islam, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Integrasi teknologi dalam fungsi-fungsi tersebut perlu dilakukan secara terpadu agar tidak menghasilkan sistem digital yang berjalan sendiri-sendiri dan justru menambah beban administratif lembaga.

1. Perencanaan pendidikan berbasis data digital

Perencanaan merupakan tahap awal dalam menentukan arah, prioritas, dan target pengembangan lembaga pendidikan. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pengelola lembaga mengumpulkan dan mengolah informasi mengenai jumlah peserta didik, kebutuhan tenaga pendidik, kondisi sarana prasarana, capaian akademik, serta kebutuhan pembiayaan. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program kerja dan menentukan prioritas anggaran.

Perencanaan berbasis data memberikan peluang bagi kepala madrasah atau pimpinan lembaga pendidikan Islam untuk mengurangi ketergantungan pada perkiraan subjektif. Misalnya, data kehadiran, perkembangan hasil belajar, dan pemanfaatan fasilitas dapat membantu lembaga mengidentifikasi bidang yang membutuhkan perhatian lebih besar. Namun, data digital tidak secara otomatis menghasilkan keputusan yang tepat. Informasi yang tersedia tetap harus diperiksa akurasi, dipahami konteksnya, dan ditafsirkan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik serta kondisi kelembagaan.

Dengan demikian, perencanaan digital perlu mengintegrasikan analisis data dengan pertimbangan profesional dan nilai-nilai Islam. Prinsip amanah menuntut penggunaan informasi secara bertanggung jawab, sedangkan prinsip keadilan mengharuskan keputusan tidak merugikan kelompok tertentu akibat kesalahan data atau keterbatasan akses teknologi.

2. Pengorganisasian sumber daya berbasis sistem digital

Pengorganisasian berkaitan dengan pembagian tugas, penetapan tanggung jawab, koordinasi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Dalam konteks digital, fungsi ini dapat diperkuat melalui sistem informasi kepegawaian, penyimpanan dokumen terpusat, kalender kegiatan, platform komunikasi internal, serta sistem pengelolaan tugas dan pelaporan.

Pemanfaatan sistem tersebut dapat memperjelas alur kerja, mengurangi duplikasi dokumen, dan memudahkan koordinasi antara pimpinan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta unit-unit pelaksana program. Setiap pihak dapat memperoleh informasi sesuai kewenangan yang dimiliki sehingga proses administrasi menjadi lebih terstruktur.

Meskipun demikian, pengorganisasian digital memerlukan kejelasan prosedur operasional, pembagian hak akses, dan tanggung jawab pengelola data. Tanpa aturan yang memadai, penggunaan berbagai aplikasi berpotensi menimbulkan ketidakseragaman informasi, tumpang tindih pekerjaan, dan ketergantungan pada individu tertentu. Oleh sebab itu, transformasi digital harus disertai penataan organisasi dan penguatan koordinasi, bukan sekadar penambahan perangkat lunak.

3. Pelaksanaan program dan pelayanan pendidikan berbasis digital

Pada tahap pelaksanaan, teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran, pelayanan akademik, komunikasi dengan orang tua, pengelolaan perpustakaan, dan penyebaran informasi kelembagaan. Sistem pelayanan akademik berbasis digital, misalnya, dapat mempermudah akses terhadap jadwal, informasi penilaian, administrasi peserta didik, dan dokumen akademik.

Dalam pendidikan Islam, penerapan teknologi juga dapat memperluas akses terhadap sumber belajar Al-Qur'an, hadis, literatur keislaman, serta materi pembelajaran interaktif. Akan tetapi, kemudahan akses perlu disertai kemampuan untuk menilai kredibilitas sumber, memahami konteks informasi, dan menjaga etika dalam penggunaan teknologi.

Pelaksanaan program digital juga harus mempertimbangkan kelompok yang memiliki keterbatasan perangkat, jaringan internet, maupun literasi digital. Lembaga pendidikan Islam perlu menyediakan alternatif layanan yang proporsional agar digitalisasi tidak menciptakan hambatan baru

bagi peserta didik dan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas pelayanan tidak hanya diukur berdasarkan kecepatan proses, tetapi juga berdasarkan keterjangkauan, keadilan akses, dan kualitas interaksi antara lembaga dengan penerima layanan.

4. Evaluasi dan pengawasan berbasis teknologi

Evaluasi merupakan fungsi manajemen yang digunakan untuk menilai ketercapaian tujuan, mengidentifikasi hambatan, dan menentukan tindak lanjut perbaikan. Teknologi digital dapat mendukung proses ini melalui dasbor indikator kinerja, laporan perkembangan program, survei kepuasan, rekapitulasi hasil belajar, dan dokumentasi kegiatan secara terstruktur.

Data yang dikumpulkan memungkinkan pimpinan lembaga melakukan pemantauan secara berkala tanpa harus menunggu laporan akhir periode. Temuan evaluasi dapat menjadi dasar untuk memperbaiki perencanaan, mendistribusikan sumber daya, dan merumuskan program pengembangan kompetensi tenaga pendidik.

Namun, evaluasi digital tidak boleh hanya berorientasi pada angka dan indikator administratif. Mutu pendidikan Islam juga mencakup pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan perkembangan spiritual peserta didik. Aspek-aspek tersebut membutuhkan penilaian yang kontekstual melalui pengamatan, refleksi, komunikasi, dan pertimbangan profesional. Oleh karena itu, evaluasi berbasis teknologi sebaiknya dipadukan dengan penilaian kualitatif agar gambaran mutu pendidikan tidak menjadi terlalu sempit.

Berdasarkan uraian tersebut, integrasi teknologi dalam fungsi manajemen pendidikan Islam perlu membentuk satu siklus yang saling terhubung. Data hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki perencanaan, perencanaan menjadi dasar pengorganisasian, pengorganisasian mendukung pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan kembali dievaluasi sebagai dasar peningkatan mutu. Siklus ini menunjukkan bahwa digitalisasi yang efektif memerlukan kesinambungan proses manajemen, bukan penerapan aplikasi secara terpisah.

C. . Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Tata Kelola Digital

Transformasi digital dalam pendidikan Islam menghadirkan kebutuhan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap berjalan searah dengan tujuan pembentukan manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Teknologi dapat mempercepat proses administrasi dan memperluas akses informasi, tetapi penggunaannya tetap membutuhkan pedoman moral agar tidak menimbulkan penyalahgunaan data, ketidakadilan pelayanan, manipulasi informasi, atau pengabaian terhadap martabat manusia.

Dalam kerangka tersebut, nilai-nilai Islam dapat menjadi landasan normatif dalam pengembangan tata kelola digital. Integrasi nilai tidak cukup diwujudkan melalui pencantuman slogan keislaman pada kebijakan lembaga, tetapi harus diterjemahkan ke dalam prosedur kerja, mekanisme pengawasan, pengambilan keputusan, dan perilaku organisasi.

Pertama, prinsip amanah menuntut setiap pengelola lembaga menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dalam tata kelola digital, amanah dapat diwujudkan melalui pengelolaan data peserta didik secara bertanggung jawab, pembatasan akses terhadap informasi sensitif, penyampaian laporan yang benar, serta pencegahan manipulasi data untuk kepentingan tertentu.

Kedua, prinsip keadilan menghendaki agar penggunaan teknologi tidak memperbesar kesenjangan antarpeserta didik maupun antarkelompok masyarakat. Lembaga pendidikan perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi ekonomi, kemampuan digital, dan ketersediaan infrastruktur ketika menetapkan layanan berbasis teknologi. Keputusan yang adil bukan berarti memberikan perlakuan yang selalu sama, melainkan memastikan setiap peserta didik memperoleh kesempatan yang layak untuk mengakses layanan pendidikan.

Ketiga, prinsip ihsan berkaitan dengan kesungguhan untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan memberikan manfaat. Dalam konteks manajemen digital, ihsan dapat diterapkan melalui peningkatan mutu pelayanan, perbaikan sistem secara berkelanjutan, ketelitian dalam mengelola informasi, dan kesediaan mengevaluasi kelemahan organisasi. Teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas kerja, bukan semata-mata untuk menunjukkan bahwa lembaga telah mengikuti perkembangan zaman.

Keempat, prinsip tabayyun menekankan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum menerima, menggunakan, atau menyebarkannya. Prinsip ini relevan dalam pengelolaan informasi digital, terutama ketika lembaga memanfaatkan data otomatis, kecerdasan buatan, dan berbagai sumber informasi daring. Informasi yang dihasilkan teknologi tetap memerlukan pemeriksaan manusia,

khususnya ketika digunakan untuk menentukan kebijakan yang berdampak terhadap hak dan masa depan peserta didik.

Kelima, prinsip **musyawarah** dapat diterapkan dalam proses perumusan kebijakan transformasi digital. Keputusan mengenai pemilihan platform, perubahan prosedur administrasi, pengembangan pembelajaran digital, dan pengelolaan anggaran sebaiknya melibatkan pihak-pihak yang terdampak sesuai kapasitas dan kewenangannya. Partisipasi tersebut dapat memperkuat penerimaan terhadap perubahan sekaligus membantu lembaga mengidentifikasi kebutuhan yang mungkin tidak terlihat dari sudut pandang pimpinan saja.

Integrasi nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa tata kelola digital dalam pendidikan Islam perlu menggabungkan efisiensi teknologi dengan tanggung jawab moral. Kajian mengenai transformasi digital dalam sistem informasi manajemen pendidikan agama Islam juga menyoroti pentingnya transparansi, penguatan tata kelola, dan perlindungan orientasi pendidikan yang berlandaskan adab.² Dengan demikian, ukuran keberhasilan transformasi digital bukan hanya kemampuan lembaga menggunakan teknologi, melainkan juga kemampuannya menjaga integritas, keadilan, dan kemaslahatan dalam setiap proses pengelolaan pendidikan.

D. Peluang, Tantangan, dan Strategi Transformasi Digital Pendidikan Islam

Transformasi digital membuka peluang bagi lembaga pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas sumber belajar, memperkuat koordinasi, dan mengembangkan pengambilan keputusan berbasis informasi. Namun, peluang tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia, kondisi infrastruktur, budaya organisasi, serta kebijakan kelembagaan.

Peluang pertama adalah peningkatan efektivitas administrasi dan pelayanan. Sistem informasi yang terintegrasi dapat mempercepat pencatatan data, memudahkan penelusuran dokumen, mengurangi pekerjaan berulang, dan meningkatkan keterbukaan informasi. Efektivitas tersebut dapat memberikan ruang bagi tenaga pendidik dan kependidikan untuk lebih berfokus pada pelayanan akademik dan pengembangan peserta didik.

Peluang kedua adalah perluasan akses terhadap pengetahuan. Teknologi digital memungkinkan peserta didik dan pendidik mengakses literatur ilmiah, sumber belajar keislaman, pelatihan daring, dan forum akademik yang tidak terbatas pada lingkungan fisik lembaga. Kondisi ini dapat memperkuat budaya belajar sepanjang hayat dan mendorong pengembangan kompetensi secara mandiri.

Peluang ketiga adalah penguatan akuntabilitas kelembagaan. Dokumentasi digital dan sistem pelaporan yang terstruktur dapat membantu pimpinan memantau pelaksanaan program, memeriksa penggunaan sumber daya, serta menyampaikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Apabila dikelola secara konsisten, sistem tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam.

Peluang keempat adalah pengembangan inovasi manajemen dan pembelajaran. Pemanfaatan analisis data dan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, memetakan perkembangan peserta didik, dan mendukung penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Meski demikian, teknologi tersebut harus digunakan sebagai alat bantu, sedangkan keputusan yang berdampak besar tetap memerlukan pertimbangan profesional dan pengawasan manusia.

Tantangan pertama berkaitan dengan kesenjangan infrastruktur. Tidak semua lembaga pendidikan memiliki kualitas jaringan internet, perangkat, dukungan teknis, dan anggaran pengembangan teknologi yang memadai. Kesenjangan tersebut dapat menyebabkan penerapan digitalisasi berjalan tidak merata dan menimbulkan perbedaan kualitas pelayanan.

Tantangan kedua adalah variasi kompetensi digital sumber daya manusia. Pimpinan, guru, dan tenaga kependidikan memiliki tingkat pengalaman dan kemampuan yang berbeda dalam menggunakan teknologi. Pengadaan aplikasi tanpa pelatihan yang memadai berisiko menghasilkan sistem yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Karena itu, pengembangan kompetensi harus menjadi bagian integral dari kebijakan transformasi digital.

Tantangan ketiga adalah resistensi terhadap perubahan organisasi. Sebagian pengelola mungkin merasa lebih nyaman menggunakan prosedur konvensional atau menganggap teknologi menambah beban pekerjaan. Kondisi ini dapat diatasi melalui komunikasi yang terbuka, pelibatan pengguna sejak tahap perencanaan, pendampingan teknis, dan penjelasan mengenai manfaat perubahan bagi pekerjaan sehari-hari.

Tantangan keempat menyangkut keamanan dan etika data. Penggunaan sistem digital meningkatkan kebutuhan terhadap perlindungan informasi pribadi, pengaturan hak akses, pencadangan data, dan prosedur penanganan insiden. Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan memerlukan kewaspadaan terhadap kesalahan informasi, bias algoritma, serta keputusan otomatis yang tidak mempertimbangkan konteks sosial dan pendidikan.

Tantangan kelima adalah risiko berkurangnya dimensi kemanusiaan dalam pelayanan pendidikan. Ketergantungan berlebihan pada aplikasi dapat membuat hubungan antara pengelola, guru, peserta didik, dan orang tua menjadi terlalu administratif. Dalam pendidikan Islam, hubungan edukatif, keteladanan, pembinaan akhlak, dan komunikasi yang empatik tetap memiliki kedudukan penting. Oleh sebab itu, digitalisasi perlu memperkuat interaksi manusia, bukan menggantikannya secara menyeluruh.

Berdasarkan peluang dan tantangan tersebut, transformasi digital dalam manajemen pendidikan Islam perlu dilaksanakan melalui strategi yang bertahap, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan kelembagaan.

Pertama, lembaga perlu menyusun peta jalan transformasi digital yang memuat kondisi awal, prioritas pengembangan, target pencapaian, kebutuhan anggaran, penanggung jawab, serta indikator evaluasi. Peta jalan tersebut membantu lembaga menentukan program yang paling mendesak dan menghindari pengadaan teknologi yang tidak sesuai kebutuhan.

Kedua, penguatan kepemimpinan digital perlu diarahkan pada kemampuan pimpinan dalam mengelola perubahan, membangun kolaborasi, memahami risiko teknologi, dan menggunakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Kepemimpinan digital tidak hanya menuntut keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan membangun budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.

Ketiga, lembaga perlu mengembangkan kompetensi digital guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan. Pelatihan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan, disertai praktik langsung, pendampingan, dan evaluasi penerapan. Keberhasilan pelatihan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah peserta, tetapi juga berdasarkan perubahan kemampuan dan kualitas kerja setelah pelatihan.

Keempat, pengembangan sistem digital perlu mengutamakan integrasi dan keamanan. Lembaga sebaiknya menghindari penggunaan terlalu banyak aplikasi yang tidak saling terhubung. Standar pengelolaan data, pembatasan hak akses, pencadangan informasi, dan prosedur perlindungan data harus ditetapkan sejak awal agar digitalisasi berlangsung secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, evaluasi perlu dilakukan secara berkala dengan memadukan indikator kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif dapat mencakup waktu penyelesaian layanan, ketepatan data, ketercapaian program, dan tingkat pemanfaatan sistem. Sementara itu, indikator kualitatif dapat mencakup kepuasan pengguna, kemudahan akses, kualitas komunikasi, dan kesesuaian layanan dengan nilai-nilai Islam. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan dan menentukan prioritas pengembangan berikutnya.

Dengan demikian, strategi transformasi digital perlu menghubungkan kesiapan teknologi, kapasitas manusia, penataan organisasi, perlindungan data, dan penguatan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini memungkinkan lembaga pendidikan Islam memanfaatkan teknologi secara lebih efektif tanpa mengabaikan karakter pendidikan yang berorientasi pada pembentukan manusia dan kemaslahatan masyarakat.

4. SIMPULAN

Transformasi digital dalam manajemen pendidikan Islam di era Society 5.0 merupakan proses perubahan tata kelola kelembagaan yang mengintegrasikan teknologi digital, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan sistem organisasi, dan penerapan nilai-nilai Islam. Transformasi ini tidak terbatas pada penggunaan perangkat teknologi dalam kegiatan administratif, tetapi mencakup perubahan pola perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan agar lebih efektif, adaptif, transparan, serta berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.

Integrasi teknologi digital dalam fungsi-fungsi manajemen memberikan peluang bagi lembaga pendidikan Islam untuk mengembangkan perencanaan berbasis data, meningkatkan koordinasi organisasi, memperluas akses pelayanan pendidikan, serta memperkuat evaluasi program secara berkelanjutan. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya bergantung pada kualitas data, kesiapan infrastruktur, kompetensi digital sumber daya manusia, dan kemampuan kepemimpinan dalam

mengelola perubahan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi perlu disertai kebijakan kelembagaan yang jelas, sistem pengawasan yang memadai, dan perlindungan terhadap informasi pribadi.

Integrasi nilai-nilai Islam menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa transformasi digital tetap berorientasi pada tujuan pendidikan yang memanusiakan manusia dan membentuk akhlak. Prinsip amanah, keadilan, ihsan, tabayyun, dan musyawarah dapat diterjemahkan ke dalam praktik pengelolaan data, pengambilan keputusan, pelayanan yang inklusif, pemeriksaan informasi, dan pelibatan pemangku kepentingan. Dengan demikian, kemajuan teknologi tidak hanya menghasilkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat integritas, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan sintesis konseptual, strategi transformasi digital dalam manajemen pendidikan Islam perlu dilaksanakan melalui penyusunan peta jalan digitalisasi, penguatan kepemimpinan digital, pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, integrasi sistem informasi, perlindungan data, serta evaluasi berbasis indikator kuantitatif dan kualitatif. Pelaksanaan strategi tersebut perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing lembaga agar transformasi digital tidak memperbesar kesenjangan akses maupun mengurangi kualitas interaksi edukatif.

Penelitian ini berkontribusi secara konseptual dengan menempatkan integrasi teknologi, fungsi manajemen, dan nilai-nilai Islam sebagai unsur yang saling berkaitan dalam pengembangan tata kelola pendidikan Islam di era Society 5.0. Namun, karena penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan, argumentasi yang dihasilkan belum membuktikan efektivitas strategi tersebut secara empiris pada lembaga pendidikan tertentu. Penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka konseptual ini melalui studi lapangan pada madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam dengan memperhatikan kesiapan digital, praktik kepemimpinan, kualitas pelayanan, serta dampaknya terhadap mutu pendidikan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Hambali, M. Syahbai, dan Khalida Zia Fitrah Azahra. "Transformasi Digital Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Agama Islam pada Era Society 5.0." *An-nida: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.30999/an-nida.v14i1.4160>.

Jaosantia, Jasmani, dan Muwafiqus Shobri. "Manajemen dan Budaya Organisasi Pendidikan Islam di Era Transformasi Digital." *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2025): 58–71. <https://doi.org/10.37348/aksi.v4i1.750>.

Shobri, Muwafiqus, dan Jasmani Jaosantia. "Digital Transformation in Islamic Education Management and Leadership: Strategies, Challenges, and Opportunities in the Society 5.0 Era." *Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (2026): 1–13. <https://ejurnal.inhafi.ac.id/index.php/jisedu/article/view/769>.

Snyder, Hannah. "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines." *Journal of Business Research* 104 (2019): 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.